

---

## PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA HANDIL TERUSAN DI KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

---

**Said Zulkifli<sup>1</sup>, Andra Wahyudi<sup>2</sup>**

saidzulkifli@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam<sup>1</sup>  
andrawahyudi@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam<sup>2</sup>

---

### **Abstract**

*The Effect of Supervision of the Village Head on the Work Discipline of the Handil Terusan Village Government Apparatus, The purpose of this study was to determine the effect of supervision on the work discipline of the Handil Terusan Village Apparatus in Anggana Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency. Collecting data in this study using observation questionnaires, interviews, and documents. The population is all village apartments, totaling 18 people, because the number is small, the population is also used as a sample using a census. Analysis of the data used in this study is Spearman Rank. The detailed results in this study indicate that supervision has an effect on the discipline of the Handil Terusan Village apparatus in Anggana District, Kutai Kartanegara Regency with a significance level of  $0.502 > 0.401$ . Thus, it can be concluded that the hypothesis in this study can be accepted by the data and theories used in this study.*

**Keywords:** *Supervision, Apparatus Discipline*

---

### **Abstrak**

Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur desa Handil Terusan di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi angket, wawancara dan dokumen. Populasi adalah seluruh apartur desa yang berjumlah 18 orang, karena jumlahnya sedikit maka populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel dengan carus sensus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rank Spearman*. Hasil secara rinci dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan berpengaruh terhadap disiplin aparatur Desa Handil Terusan Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,502 > 0,401$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima data maupun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** *Pengawasan, Disiplin Aparatur*

---

DOI : -

<b>Received</b>	:	
<b>Accepted</b>	:	
<b>Published</b>	:	
<b>Copyright Notice</b>	:	<b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0</u></b>

[International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. LATAR BELAKANG

Handil Terusan merupakan salah satu desa yang di Kecamatan Anggana Kabuten Kutai Kartanegara yang terletak di Pesisir Mahakam. Dimana wilayah ini merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam dengan beroperasinya lapangan migas milik perusahaan Total E&P Indonesia dan VICO Indonesia. Selain itu, masyarakat di daerah ini juga mengandalkan sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 7 tahun 2005 diarahkan pada perubahan kelembagaan dan, sistem tatalaksanaan pemerintahan, kualitas sumberdaya manusia, dan sistem pengawasan yang efektif. Pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu disebabkan dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan serta sulitnya dalam mencari solusi perbaikan. Hal ini ditopang pula oleh tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan, banyaknya praktek KKN dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah, sehingga mencerminkan suatu kondisi birokrasi pemerintahan yang masih jauh dari harapan masyarakat.

Sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa bertujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, serta melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Isu yang diangkat dari penelitian adalah ingin melihat pengaruh kepala desa terhadap aparturnya atau bawahan dalam fungsi pengawasan untuk menegakan disiplin. Bagi seorang kepala desa komunikasi adalah sebagai suatu alat yang dapat di gunakan untuk bersedia mengubah perilaku bawahan serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kebersedian seseorang untuk menaati semua peraturan. Tindakan disiplin pada umumnya tergambar melalui senantiasa tepat waktu dalam aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, taat pada aturan yang berlaku merupakan cerminan sebuah kedisiplinan. Aparat pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mampu menamamkan kedisiplinan dalam diri karena tugasnya sebagai pelayan masyarakat serta berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Urgensinya penelitian ini dilakukan adalah di tuntutan profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Aparatur pemerintah desa juga sebagai panutan yang harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat yaitu disiplin pada saat melakukan pekerjaannya. Disiplin tidak hanya di bangun secara eksternal melalui aturan yang di terapkan oleh pemerintah, namun juga harus secara internal yaitu berasal dari dalam diri aparat itu sendiri. Permasalah atau isu yang muncul pada saat di lapangan terlihat aparat desa yang tidak mengikuti aturan tentang jam bekerja ada yang datang terlambat ada yang pulang cepat, kemudian seragam dinas yang diberikan oleh kantor sering tidak dipakai, fasilitas kantor yang seharusnya dipakai untuk kepentingan kantor malah digunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian maka, untuk meningkatkan disiplin aparat tersebut adalah dengan memfungsikan pengawasan dari kepala desa. Pengawasan pada dasarnya merupakan aktivitas membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakankoreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuannya, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan disiplin aparat sebagai pemberi pelayanan bagi organisasi kepada masyarakat.

Pengawasan adalah proses untuk menjamin agar tujuan organisasi dan manajemen tercapai. dengan demikian tujuan dari pengawasan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Apakah pelaksanaan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi telah sesuai dengan kebijaksanaan, pengarahan, prosedur, dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan;
3. Untuk mengetahui apakah ada kesulitan-kesulitan, hambatan- hambatan, tantangan, peluang dan potensi-potensi yang penting diketahui untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan bilamana perlu melaksanakan tindakan koreksi;
4. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efisien, efektif dan produktif dilihat dari tenaga, biaya, perlengkapan/peralatan dan sarana prasarana yang ada;
5. Untuk mengambil tindakan koreksi dan meluruskan kembali bila terjadi penyimpangan tujuan organisasi serta ketidak beresan dalam pelaksanaan rencana dan program;
6. Dengan adanya pengawasan dapat dicegah terjadinya penyimpangan, pemborosan dan kegagalan yang tidak perlu.

Menurut Siagian dalam Suhendra (2008) “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan”.

Selanjutnya menurut Ichwan dalam Suhendra (2008) mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan tolak ukur / kriterianya dan di ikuti dengan tindakan perbaikan / koreksi”.

Dengan demikian pengawasan adalah terdiri dari segala usaha agar segala sesuatu itu sesuai dengan rencana yang sudah diterma, dgn instruksi yang sudah dikeluarkan dan dengan prinsip yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu maka, hal pokok yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yaitu melakukakannya secara berjenjang dan bersifat membina aparatur, dilakukan secara terus menerus, diarahakan untuk pencegahan serta dengan sistem tertentu.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan “yang semestinya” atau tidak. Yang dengan yang semestinya adalah sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan, sesuatu dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna.

Maksud diadakannya atau dilakukannya pengawasan adalah untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Jadi maksudnya pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, akan tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, adapun tujuan diadakannya dari pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dgn rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

#### Tekhnik Pengawasan

Sarwoto (2010 : 101) Pengawasan langsung, pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi

1. Pemeriksaan ditempat itu berupa pemeriksaan administarsi atau pemeriksaan lapangan dilakukan oleh pimpinan penanggung jawab pekerjaan aparat pengawasan fungsional kunjungan kerja DPRD

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yg dilakukamn dengan cara tidak mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yg diperiksa, tetapi dilakukan dibelakang meja atau dari karak jauh. cara pengawasan tidak langsung ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan di atas meja atau “desk audit” yaitu dengan mempelajari dan menganalisis segala dokumen yg menyangkut obyek yang di awasi antara lain.

Kedisiplinan merupakan masalah yang sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan organisasi untuk melayani. Tanpa adanya disiplin akan menyebabkan pelaksanaan kerja terhambat atau tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi akan terhambat dan sulit tercapai. Disiplin menurut Alex S. Nitisemito (2002) menyebutkan “Disiplin kerja dapat diartikan suatu sikap, tingkah laku dan juga perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis”.

Oleh sebab itu organisasi memerlukan disiplin, adanya disiplin tersebut dapat dilihat apabila orang-orang, pegawai-pegawai dengan senang hati melaksanakan aturan-aturan, norma-norma, instruksi-instruksi atasannya dan mentaati aturan-aturan yang dinyatakan berlaku padanya. Dengan demikian disiplin dapat dilihat apabila pegawainya dengan senang hati melaksanakan aturan-aturan yang diberikan oleh atasannya yang berlaku terhadapnya.

Selanjutnya menurut Prajudi Admosudirdjo (2002) menyebutkan “Disiplin pada hakekatnya adalah keataatan, ketekunan, kegiatan, sikap kelakuan, sikap hormat yang

nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati antara badan organisasi dan pegawai-pegawainya (warga-warganya)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa disiplin atau tingkah laku yang tertib mempunyai hubungan dengan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang diakui. Misalkan adalah penting bagi pegawai bawahan untuk melapor ditempat pekerjaan tepat pada waktunya, memperhatikan peraturan-peraturan yang melarang merokok dan minum, berpakaian sebagaimana dikehendaki serta mengikuti prosedur resmi di dalam pekerjaan, bertingkah laku terhadap orang-orang atas cara-cara yang diakui dalam masyarakat, sekurang-kurangnya menjalankan secara efektif beban pekerjaan minimum.

Selanjutnya menurut DS. Widodo (2003) menyebutkan “Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin pada hakekatnya adalah rasa ketaatan yang telah disepakati baik oleh instansi maupun para pegawainya yang ada di dalam organisasi dan ukuran disiplin seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari dalam hubungannya dengan organisasi dimana ia bekerja menimbulkan manfaat bagi orang lain.

Menurut AS. Munandar (2005) menyebutkan manfaat dari disiplin adalah ”kesadaran diri untuk mentaati nilai-nilai, norma-norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungannya dan juga dapat diartikan sebagai ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan atau diharapkan oleh masyarakat agar kehidupan di dalam masyarakat dan negara berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, maka disiplin tenaga kerja adalah ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan atau diharapkan oleh suatu kantor atau perusahaan agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara tertib dan lancar”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari dilaksanakannya disiplin adalah agar setiap pegawai di dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dapat berjalan dengan tertib dan lancar karena mengikuti nilai, norma dan aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap disiplin aparatur pemerintah desa handil terusan di kecamatan anggana kabupaten kutai kartanegara

## 2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang dilakukan terhadap dua variabel mandiri dengan menghubungkan variabel untuk menjawab pertanyaan tentang adanya keterkaitan antara variabel tersebut. Menurut Masri Singarimbun dan Sopian Efendi (2003) penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok disebut penelitian survei. Pada umumnya yang merupakan unit analisis dalam penelitian survei adalah individu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik berikut ini yaitu:

1. Angket dan Kuesioner
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk membuktikan sejauh mana pengawasan ini mempunyai pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa di kantor Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana.

Untuk menganalisis data yang di hasilkan, digunakan suatu alat ukur menggunakan formulasi koefisien Rank Spearman ( $r_s$ ) dalam Sidney Sigel (2011), sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

## 3. HASIL

Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menegakkan disiplin pegawai di Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana ini peneliti menggunakan beberapa indikator, untuk pengawasan yang diteliti adalah pengawasan langsung terdiri dari inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan di tempat, sedangkan untuk pengawasan tidak langsung diteliti berupa laporan tertulis dan laporan lisan, sedangkan untuk didiplin kerja pegawai yang diteliti adalah ketaatan pada ketentuan jam kerja, pemakaian seragam sesuai aturan, penggunaan fasilitas kantor dan loyalitas pada pekerjaan

Berikut data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian sebagai berikut

### 1. Inspeksi Langsung

Untuk mengetahui hasil jawaban responden selaku aparatur desa apakah kepala desa pernah melakukan inspeksi langsung, bahwa kepala desa pernah melakukan inspeksi langsung terhadap aparatur pemerintah sebesar 64,5 % di Kantor Desa, sisanya kepala desa kadang – kadang melakukan inspeksi langsung terhadap aparatur pemerintah Desa sebesar

5,5 % , hal ini di karenakan tugas yang ada di luar menjadi penyebab kepala desa tidak bisa setiap harinya melakukan pengawasan. Selain itu kepala desa juga sudah menunjukkan tugasnya ketika melakukan inspeksi langsung yaitu memberikan bimbingan kepada bawahannya dan memberikan arahan dalam melaksanakan tugas – tugas yang di kerjakan oleh aparatur pemerintah desa sebesar 88 % , sangat jarang kepala desa tidak memberikan bimbingan kepada bawahannya ketika melakukan inspeksi langsung sebanyak 2 % .

### **1.1. Observasi di tempat**

Kepala desa apabila datang ke kantor beliau selalu melakukan pengamatan di masing-masing bagian, hal ini menunjukkan bahwa kepala desa selalu melakukan observasi di tempat untuk memastikan bawahannya bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar 78 % , namun kadang-kadang kepala desa melakukan sepintas saja, disebabkan bisa pada saat itu ada tugas-tugas yang beliau kerjakan perlu penyelesaian segera. Sedangkan penilaian kepala desa atas observasi ditempat yang di lakukannya, menunjukkan bahwa kepala desa ketika melakukan observasi di tempat memberikan penilaian yang positif kepada bawahannya atas pekerjaan aparatur pemerintah desa lakukan sebesar 67 % , dan tidak pernah kepala desa memberikan penilaian yang negatif kepada aparatur pemerintah desa 33 %

### **1.2. Laporan di tempat**

Untuk laporan ditempat ditanyakan apakah kepala desa apakah pernah meminta laporan tertulis kepada aparatur atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden sebagian besar pernah melakukan laporan tertulis kepada kepala desa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sebesar 61 % , namun ada juga kadang-kadang mereka memberikan laporan hanya kalau diminta, yaitu sebesar 39 % .

Selanjutnya bagaimana sikap kepala desa mengenai laporan yang telah di sampaikan tersebut, apa yang dilakukan oleh kepala desa, bahwa kepala desa memberikan sikap yang positif terhadap laporan yang di sampaikan oleh aparatur pemerintah desa dalam menyampaikan persoalan mengenai pekerjaan yang di lakukan atau 83 % . Hal ini di lakukan agar tujuan organisasi yang di inginkan tercapai sesuai dengan tujuan

## **2. Pengawasan tidak langsung.**

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukamn dengan cara tidak mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diperiksa, tetapi dilakukan dibelakang meja atau dari karak jauh. cara pengawasan tidak langsung ini dapat dilakukan



dengan pemeriksaan di atas meja atau “*desk audit*” yaitu dengan mempelajari dan menganalisis segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi.

Untuk mengetahui pengawasan tidak langsung ini, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel penyajian data beserta uraiannya sebagai berikut :

### **2.1. Laporan tertulis**

Untuk laporan tertulis ini ditanyakan kepada responden apakah selama ini aparatur desa pernah menyampaikan laporan tertulis mengenai pekerjaan yang ditugaskan oleh kepala desa, aparatur pemerintah desa pernah menyampaikan laporan tanpa harus diminta oleh kepala desa sebesar 88 %, namun masih ada responden yang kadang-kadang menyampaikan, bahkan ada yang tidak menyampaikan laporannya kinerjanya kalau tidak diminta sebesar 11,2 %

Selanjutnya untuk mengetahui hasil jawaban responden, berikut ditanyakan bagaimana tanggapan dari kepala desa terhadap laporan tertulis yang telah dibuat kepala desa menilai baik atas laporan yang disampaikan sebesar 78 %, namun ada laporan tertulis yang dibuat oleh aparatur pemerintah desa, membuat kepala desa tidak jarang menanggapi dan mengambil sikap yang negatif terhadap bawahannya mengenai laporan yang disampaikan secara tertulis, karena laporan yang dibuat hanya sekedar formalitas sebesar 22,2 %, tanpa mengindahkan aturan yang berlaku dalam membuat pelaporan.

### **2.2. Laporan lisan**

Untuk mengetahui laporan tertulis ini ditanyakan kepada responden apakah aparatur desa pernah menyampaikan laporan secara lisan kepada kepala desa mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan hal ini ditunjukkan bahwa responden pernah menyampaikan laporan lisan kepada kepala desa sebesar 56 %, namun ada yang kadang-kadang aparatur pemerintah desa juga menyampaikan laporan lisannya kepada kepala desa mengenai pekerjaan yang mereka kerjakan, menurut mereka justru dengan laporan lisan ini biasanya kepala desa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya sebesar 44 %. Selanjutnya untuk hasil jawaban responden atas pertanyaan bagaimana tanggapan kepala desa mengenai laporan lisan yang telah disampaikan, bahwa kepala desa dapat menerima dengan baik dalam menanggapi laporan lisan yang disampaikan oleh bawahannya, karena dengan laporan lisan ini terjadi hubungan yang baik dan harmonis antara pimpinan dengan bawahannya, dengan demikian maka terjadilah komunikasi dua arah, sehingga kepala desa dapat segera mengetahui apa yang terjadi dengan bawahannya ketika ada tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dan dapat segera diselesaikan dengan baik sebesar 100 %

### **3. Disiplin Kerja**

Disiplin kerja sebagai suatu sikap dan perilaku pegawai yang berorientasi pada penggunaan waktu kerja secara efisien oleh para aparatur desa, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk mengukur disiplin kerja aparatur pemerintah desa di gunakan empat indikator sebagai berikut yaitu

#### **3.1. Ketaatan pada ketentuan jam kerja.**

Terlihat benar bahwa ini sebagian besar aparatur masih banyak yang melanggar aturan, atau tidak taat dan patuh atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pada saat masuk kerja sebesar 39 %, oleh karena itu kepala desa harus memberikan teguran kepada mereka yang sering telambat, sebaiknya dalam beberapa kesempatan seperti apel pagi atau pada saat rapat kepala desa harus tegas dan memberikan sanksi kepada mereka yang ketahuan selama satu atau dua minggu berturut-turut terlambat. Selanjutnya pada saat jam pulang kerja aparatur memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menaati jam pulang kerja sesuai peraturan yang berlaku 61 %, namun ada beberapa aparatur yang pulang melebihi jam pulang kantor, hal ini disebutkan masih ada beberapa pekerjaan yang saat itu belum selesai, sehingga mereka masih menggunakan waktu yang tersisa untuk menyelesaikannya.

Selanjutnya apakah aparatur selalu menandatangani absen tepat waktu saat datang dan pulang kantor, bahwa ada sebagian besar responden yang selalu menandatangani absen sesuai dengan peraturan kantor desa yang telah ditetapkan sebesar 72 %, namun masih ada aparatur yang kadang-kadang menandatangani absen tidak sesuai dengan peraturan yang ada oleh karena itu kepala desa harus memberikan peran kepada sekretaris desa untuk mengawasinya, agar tidak ada aparatur yang semaunya untuk menandatangani absen, dengan demikian disiplin bisa ditegakkan

#### **3.2. Pemakaian seragam sesuai aturan kantor**

Penggunaan seragam ini, peneliti menanyakan kepada para responden apakah selama ini aparatur menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang ada, bahwa sebagian besar responden selalu menggunakan seragam sesuai dengan aturan kantor sebesar 73 %, namun ada beberapa aparatur yang tidak menggunakan pakaian seragam pada hari-hari kerja 27 %, oleh karena itu kepala desa dan sekretaris desa perlu melakukan pengawasan melekat, agar para aparatur ini disiplin dalam aturan yang ada. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah aparatur mampu dan mau menaati peraturan kantor mengenai pakaian seragam ini ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aparatur atau responden mampu dan mau menaati peraturan mengenai pemakaian seragam sebesar 100 %.

### **3.3. Penggunaan fasilitas kantor secara tepat guna**

Mengenai penggunaan fasilitas kantor ini responden menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan apakah aparatur selalu menggunakan fasilitas kantor secara tepat guna untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah di tugaskan oleh kepala desa. ternyata bahwa pada umumnya responden selalu menggunakan fasilitas kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah tersedia selalau tepat guna di dalam menjalankan tugas – tugas yang telah di berikan oleh kepala desa sebesar 56 %, namun ada juga kadang – kadang dari responden tidak menggunakan fasilitas kantor dalam menyelesaikan tugas yang di berikan kepala desa sebesar 44 %, hal in di karenakan responden sudah memilikinya seperti laptop, android ketika mereka berhubungan dengan aparatur lain, atau posisi aparatur desa yang berada di luar kantor. Namun di indikasikan bahwa hampir rata-rata pegawai memanfaatkan fasilitas yang semestinya untuk keperluan kantor, akan tetapi di salahgunakan oleh aparat untuk kepentingan pribadi sebesar 83 %, melihat kondisi ini kepala desa semestinya dapat bertindak tegas, boleh dipakai tapi atas ijin dari pihak kelurahan, jadi tidak boleh digunakan untk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak kelurahan. Hal ini merupakan tindakan tidak disiplin aparatur pemerintah desa dalam menggunakan fasilitas umum yang ada di Kantor Desa Handil Terusan. apakah fasiltas kantor desa yang ada dapat memudahkan proses pekerjaan dalam hal menjalankan tugas yang telah di berikan, ternyata bahwa fasilitas yang ada di kantor desa Handil Terusan tersebut dapat memudahkan setiap pegawai dalam memperlancar pekerjaan mereka serta sudah bisa di katakan memenuhi standar kelengkapan bagi sebuah kantor desa yang berada di Kecamatan Anggana.

### **3.4. Loyalitas pada pekerjaan**

Untuk mengetahui tingkat loyalitas pegawai di dalam melakukan pekerjaanya peneliti mengajukan pertanyaan apakah segala pekerjaan yang dikerjakan itu di pertanggungjawabkan, ternyata semua responden dapat bertanggungjawab atas apa yang menjadi beban kerja mereka sebesar 95 %. Ketika seorang aparatur memiliki loyalitas tinggi, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap instansinya. Aparatur akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan instansi. Selanjutnya mengenai kerjasama terjalis hubungan yang baik dengan sesama pegawai maupun dengan atasan. Responden pada umumnya melakukan kerjasama yang baik antar sesama apartur maupun dengan atasannya zebesar 89 %. Aparatur yang loyal, tidak segan untuk bekerja sama dengan aparatur lain apalagi dengan atasannya. Bekerja sama dengan orang lain dalam

suatu kelompok memungkinkan seorang pegawai mampu mewujudkan impian instansinya untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang secara individual.

### Analisis Data

Peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman ( $r_s$ ) dengan formulasi seperti berikut ini.

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

Sebagai langkah awal, berikut ini peneliti sajikan hasil perhitungan untuk variabel pengawasan (X) terdapat enam himpunan berangka sama dengan nilai 474 dan variabel disiplin kerja aparatur (Y) terdapat enam himpunan berangka sama dengan nilai 475,5 sedangkan untuk  $\sum d_i^2 = 472$

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari perhitungan di atas, maka korelasinya dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \cdot \sum y^2}}$$

$$r_s = \frac{949,5 - 472}{2 \sqrt{225,387}}$$

$$r_s = \frac{477,5}{949,49}$$

$$r_s = \frac{(474) + (475,5) - 472}{2 \sqrt{474 \cdot 475,5}}$$

$$r_s = \frac{477,5}{2 \cdot 474,749}$$

$$r_s = 0,502901558 = 0,502$$

### Pengajuan Hipotesis

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa harga  $r_s$  empiris atau  $r_s$  hitung adalah 0,502, jika dibandingkan dengan harga  $r_s$  tabel pada  $N = 18$  dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,361 pada tes satu sisi. Dengan kata lain bahwa  $r_s$  hitung lebih besar dari  $r_s$  tabel yaitu  $0,502 > 0,401$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur, ini berarti menerima hipotesis yang telah diajukan terdahulu yaitu Ada Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Maka tugas pokok Kepala Desa memiliki tugas antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa meliputi: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan meliputi: pembangunan sarana prasarana perdesaaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan meliputi: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan dan
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan Karang Taruna.

Sesuai dengan peraturan Bupati tersebut di atas, maka sebagai gambaran bahwa Desa Handil Terusan memiliki luas wilayah 17.000 Hektar dengan jumlah penduduk 4.785 jiwa di antaranya terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.536 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.249 jiwa dengan total jumlah Kepala keluarga sebanyak 1.379.

Desa yang berada di Kawasan delta Mahakam ini berbatasan dengan Kecamatan muara badak di bagian utara, Kecamatan sanga-sanga dan muara jawa di bagian selatan serta berbatasan langsung dengan Kota Samarinda di bagian barat, serta di bagian timur berbatasan dengan perariran selat makassar.

Hipotesisnya mengatakan bahwa “Ada Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Disiplin Kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana”. Perhitungan analisis Korelasi Rank Spearman digunakan untuk melihat pengaruh atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk Ordinal. Korelasi rank spearman pada variabel pengawasan terhadap disiplin kerja menghasilkan arah positif yaitu diketahui bahwa harga  $r_s$  empiris atau  $r_s$  hitung adalah 0,502, jika dibandingkan dengan harga  $r_s$  tabel pada  $N = 18$  dengan tingkat kebenaran 95 % dan tingkat kesalahan 0,05 adalah 0,401, untuk tingkat satu sisi. Jadi, jika di bandingkan maka  $r_s$  perhitungan lebih besar dari pada  $r_s$  tabel kritis (  $0,502 > 0,401$ ). Dengan demikian hipotesis yang di rumuskan peneliti dapat diterima yaitu ada pengaruh pengawasan Kepala Desa terhadap disiplin kerja aparatur pemerintah Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerapan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di kantor tersebut berpengaruh sebesar 50, 2 %. Artinya masih banyak faktor atau fungsi lain yang dapat mempengaruhi disiplin kerja.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa secara empirik, fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap Disiplin kerja aparatur. Pengaruh tersebut sekaligus memberi makna bahwa hubungan kedua variabel positif, karena koefisien korelasinya lebih besar dari uji tabelnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu faktor penentu peningkatan disiplin kerja pegawai, khususnya pada kantor Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kartanegara. Hal ini mengindikasikan terdapat kontribusi faktor pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai, walaupun disiplin kerja pegawai belum optimal.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengawasan dan disiplin kerja pegawai pada Kantor Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada katagori sedang,
2. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah di lakukan, dapat di nyatakan bahwa adanya pengaruh pengawasan kepala desa terhadap disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dapat di buktikan dari hasil perhitungan  $r_s$  0,502 lebih besar dari pada  $r_s$  tabel 0,401
3. Bahwa hipotesis penelitian yang diajukan dapat uji kebenarannya secara empiris sekaligus teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini terbukti bahwa pengawasan dapat meningkatkan disiplin kerja khususnya bagi apartur Kantor Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dedy Mulyadi, 2015, *Prilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Malayu S.P. Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan M.S, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 28 Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Manullang, 2009, *Dasar – dasar Manajemen, cetakan ke 21*, penerbit : Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Miftha Thoha, 2010, *Manajemen Kepegawaian Sipil Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rivai Veithzal, 2006, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rivai, Veithzal & Ella J.S, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarwoto, 2010, *Dasar – dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan ke enam belas, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sondang P, Siagian, 2005, *Fungsi – fungsi Manajerial Cetakan Pertama*, Edisi Revisi, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Maringan Masry Simbolon, 2004. *Dasar – dasar Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suhendra, K. 2008, *Manajemen dan Organisasi dalam realita kehidupan Cetakan ke 2*, Penerbit : CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumdi, 2004. *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula Pelajar*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sastrohadiwiryo, 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Oprasional*, PT. Bumi Aksara, Bandung.
- Terry, George R. & leslie W. Rue, 2005. *Dasar – dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 6/2014 tentang Desa

PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 47/ 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 83/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Permendagri Nomor 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Permendagri Nomor 67/2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **Website.**

[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf) ( di akses 22 mei 2020 jam 10 : 45)

<http://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-43-2014.pdf> ( di akses 22 mei 2020 jam 10 : 49)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/47TAHUN2015PP.pdf> ( di akses 22 mei 2020 jam 11 : 55)

[https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permendagri\\_7\\_2008.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permendagri_7_2008.pdf) (di akses 25 mei 2020 jam 21 : 45)

[https://aguslabuhanhaji.files.wordpress.com/2015/09/permendagri\\_35\\_2007.pdf](https://aguslabuhanhaji.files.wordpress.com/2015/09/permendagri_35_2007.pdf) (di akses 27 mei 2020 jam 14 : 51)

[pengaruh-pengawasan-badan-permusyawarata.pdf](#) ( di akses 27 mei 2020 jam 17 : 06)

<https://infoasn.id/pp-2010/pp-53-tahun-2010-tentang-disiplin-pns.html> ( di akses 28 mei 2020 jam 05 : 45)

<https://media.neliti.com/media/publications/150756-ID-pengawasan-atas-penyelenggaraan-pemerint.pdf> ( di akses 28 mei 2020 jam 06 : 19)